

PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT TAHUN 2023 PERIODE II

Kendawangan
KETAPANG
KALIMANTAN BARAT

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.12764/MENLHK-PKTL/PSDH/PLA.1/11/2023
Tanggal : 22 November 2023

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Wurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 197403211993021001

KETERANGAN

- | | |
|---|--------------------|
| BANGUNAN LAIN DAN BATAS ADMINISTRASI | PERHUBUNGAN |
| ● Ibukota Provinsi | — Jalan |
| --- Batas Negara | — PERAIRAN |
| --- Batas Provinsi | — Sungai |
| --- Batas Kabupaten | — Danau / Waduk |
| — Garis Pantai | |

LOKASI PENGHENTIAN IZIN

- Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL);
- Hutan Konservasi dan Hutan Lindung
- Lahan Gambut

- DASAR :**
- Institusi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tanggal 7 Agustus 2019;
 - Surat Tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ST.51/MENLHK/PKTL/PLA.1/02/2019 untuk melaksanakan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tanggal 22 Agustus 2019;
 - Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.8/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- SUMBER :**
- Peta Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2023;
 - Peta Perizinan Usaha Pemanfaatan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2023;
 - Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2023;
 - Peta Pelepasan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2023;
 - Peta Penutupan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2022;
 - Data Bidang Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2023;
 - Peta Lahan Gambut Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2011;
 - Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial;
 - Peta Batas Administrasi, Badan Informasi Geospasial Tahun 2023;
 - Survei Lapangan.

Catatan Tambahan :
Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka menjadi pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Petunjuk Lembar Peta



Peta Situasi

